

KATA PENGANTAR

Pelaporan merupakan bagian penting dari serangkaian proses perencanaan suatu kegiatan, yang memuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan suatu organisasi. Pelaporan pelaksanaan organisasi Perangkat Daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kegiatan dan kinerja keuangan sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi bagian dari sistem pengendalian administrasi pemerintahan, yang diharapkan mampu menggambarkan kinerja dinas baik yang berhasil maupun yang pencapaiannya belum maksimal dengan harapan ada perbaikan dimasa mendatang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP, dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LKjIP Tahun 2018 pada dasarnya mengetengahkan gambaran Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan secara utuh selama perjalanan Tahun 2018, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja input, output dan outcome dari setiap program dan kegiatan.

Akhir kata, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya atas kerja sama seluruh jajaran di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan yang telah mendukung tercapainya kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja dalam rangka mewujudkan *Good Government*.

Balikpapan, 18 Februari 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN



IKETUT ASTANA

Dispertukim

IKHTISAR EXECUTIVE

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan *Good Governance*, karena LKjIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan; (2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah. Tujuan penyusunan LKIP sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2018 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan melalui pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tersebut, maka dirumuskan tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman
2. Tersedianya rumah tinggal yang memenuhi persyaratan
3. Meningkatkan keindahan dan layanan pemakaman

Dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Mengurangi Luas Kawasan Kumuh
2. Mengurangi Backlog Perumahan
3. Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni
4. Meningkatkan Penyediaan Taman Kota
5. Meningkatkan Pelayanan Pemakaman

Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, LkjIP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2018, tetapi juga memuat kekurangan/permasalahan yang ada sehingga dapat dirumuskan solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang.

Secara umum penyelenggaraan Tahun 2018 dapat dikatakan cukup berhasil, hal ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 5 sasaran strategis dengan 5 indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RKT dan PK Dinas Perumahan dan Permukiman menunjukkan bahwa terdapat 4 capaian kinerja sasaran strategis dengan katagori sangat berhasil (capaian kinerja > 85 sd 100%), dan 1 capaian kinerja sasaran strategis dengan katagori tidak berhasil (capaian kinerja <85 sd 0%). Adapun indikator capaian sasaran adalah sebagai berikut :

A. Capaian kinerja sasaran strategis dengan katagori sangat berhasil

1. Sasaran :

Mengurangi Luas Kawasan Kumuh

Indikator sasaran :

Persentase berkurangnya luasan kawasan kumuh

Target kinerja 2,37%, realisasi 2,37%, capaian kinerja 100%

2. Sasaran :

Mengurangi Backlog Perumahan

Indikator sasaran :

Persentase penurunan backlog perumahan

Target kinerja 81%, realisasi 70%, capaian kinerja 113,58%

3. Sasaran :

Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni

Indikator sasaran :

Persentase penurunan rumah tidak layak huni

Target kinerja 0,86%, realisasi 0,77%, capaian kinerja 110,46%

4. Sasaran :

Meningkatnya Pelayanan Permakaman

Indikator sasaran :

Persentase ahli waris yang puas terhadap pelayanan permakaman

Target kinerja 94%, realisasi 100%, capaian kinerja 106%

B. Capaian kinerja sasaran strategis dengan katagori tidak berhasil

1. Sasaran :

Meningkatnya Penyediaan Taman Kota

Indikator sasaran :

Persentase penyediaan taman kota.

Target kinerja 0,014%, realisasi 0,0013%, capaian kinerja 9,17

Terhadap capaian kinerja tersebut, khususnya capaian kinerja dengan katagori tidak berhasil, perlu mendapat perhatian dengan menentukan kendala atau permasalahan serta menganalisa faktor-faktor pendukung, peluang, serta strategi yang akan dilakukan terhadap permasalahan atau kendala yang dihadapi tersebut. Sehingga pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya dapat terlaksana dengan maksimal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI	1
B. TUGAS DAN FUNGSI.....	1
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
D. SUMBER DAYA APARATUR.....	3
E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	6
F. PERMASALAHAN UTAMA.....	7
G. SARANA DAN PRASARANA KERJA.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. RENCANA STRATEGIS	10
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	16
C. PERJANJIAN KINERJA	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP TAHUN 2017	21
B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	22
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	23
D. REALISASI ANGGARAN.....	37
BAB IV PENUTUP	41
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rincian Pegawai Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin, Status Kepegawaian, Golongan dan Pendidikan	4
Tabel 2.	Sarana dan Prasarana Kerja Disperkim.....	8
Tabel 3.	Target Kinerja Disperkim Tahun 2017-2021.....	12
Tabel 4.	Rencana Kerja Tahunan Disperkim.....	14
Tabel 5.	Program dan Kegiatan Disperkim.....	14
Tabel 6.	Indikator Kinerja Program/Kegiatan Disperkim.....	16
Tabel 7.	Perjanjian Kinerja Kepala Disperkim.....	18
Tabel 8.	Target dan Realisasi Belanja Disperkim Tahun 2018.....	19
Tabel 9.	Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis.....	19
Tabel 10.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017.....	21
Tabel 11.	Capaian Kinerja Disperkim.....	22
Tabel 12.	Formulasi Indikator Kinerja Utama.....	23
Tabel 13.	Jumlah Rumah yang Menerima DAK Tahun 2018.....	32
Tabel 14.	Jumlah Rumah Berdasarkan Sumber Dana Bantuan.....	32
Tabel 15.	Luas Taman di Kota Balikpapan.....	34
Tabel 16.	Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis.....	38
Tabel 17.	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2018.....	39

BAB I

PENDAHULUAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan akuntabilitas kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dasar pembentukan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kota Balikpapan dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta perencanaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman;
- b. penyusunan rancangan kebijakan pencegahan timbulnya permukiman kumuh;
- c. penyusunan rancangan kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh;
- d. pengoordinasian penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas dipermukiman khususnya di kawasan pembangunan perumahan;
- e. pengembangan dan penyebaran sistem informasi dan komunikasi perumahan dan permukiman; pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan, permukiman, pertamanan dan permakaman;
- f. perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian teknis dan pembinaan di bidang perumahan dan permukiman yang meliputi pembiayaan, pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan;
- g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervise penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman;
- h. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberian layanan konsultasi dan rekomendasi bidang perumahan dan permukiman;
- i. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- j. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- k. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- l. pelaksanaan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- m. penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas perumahan;
- n. pelaksanaan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- o. pembinaan sertifikasi dan registrasi kepada orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- p. pembinaan dan pengendalian UPT;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- r. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ditunjang dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretariat membawahkan :**
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum;
- 3. Bidang Perumahan membawahkan :**
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Perumahan;
 - b. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Prasarana, Sarana, Utilitas dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan
- 4. Bidang Permukiman membawahkan :**
 - a. Seksi Permukiman;
 - b. Seksi Pengelolaan Air Limbah dan Air Bersih Permukiman; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Permukiman
- 5. Bidang Pertamanan dan Permakaman membawahkan :**
 - a. Seksi Pertamanan;
 - b. Seksi Permakaman; dan
 - c. Seksi Pembibitan dan Penghijauan
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas; UPT Rumah Susun Sewa**
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional**

D. SUMBER DAYA APARATUR

Berdasarkan data per 1 Januari 2018, Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki Sumber Daya Manusia sebanyak 80 (Delapan puluh) orang. Berikut tabel yang menampilkan secara rinci jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, status kepegawaian, golongan dan pendidikan:

Tabel 1.
Rincian Pegawai Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin,

Status Kepegawaian, Golongan dan Pendidikan

JABATAN	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian		Golongan				Pendidikan					
	Laki-laki	Perempuan	PNS	NABAN /THL	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
Kepala	1		1		1				1					
Sekretaris	1		1		1				1					
Kasubag Program & Keuangan		1	1			1				1				
Pengadministrasi Umum		1	1			1						1		
Bendahara (penerimaan)		1	1				1					1		
Bendahara (pengeluaran)	1		1				1					1		
Kasubag Umum		1	1			1				1				
Pengadministrasi Kepegawaian	1		1				1			1				
Pengolah Data		1	1				1				1			
Pengadministrasi Umum	1		1				1					1		
Pengadministrasi Umum	1		1				1					1		
Pemelihara Kendaraan	1		1				1					1		
Pengadministrasi Umum	1			1								1		
Pengadministrasi Persuratan		1		1						1				
Pengadministrasi Umum		1		1								1		
Petugas keamanan	1			1								1		
Pramu Taman	1			1										1
Pramu Bakti		1		1								1		
Pramu Bakti		1		1										1
Kabid Perumahan	1		1		1				1					
Kasi Perencanaan & Pengembangan Perumahan		1	1			1				1				
Analisis Arsitektur		1	1			1				1				
Pengadministrasi Umum	1			1						1				
Kasi Perencanaan & Pengembangan PSU														
Pengadministrasi Umum	1		1				1					1		
Kasi Pengawasan dan Pengendalian Perumahan	1		1			1				1				
Pengadministrasi Umum	1		1				1					1		
Petugas Perlengkapan	1		1					1					1	
Kabid Permukiman	1		1		1				1					
Kasi Penataan Permukiman	1		1			1					1			
Pengawas Fisik Permukiman	1		1			1				1				
Pengadministrasi Umum	1			1								1		
Kasi Pengelolaan Air Limbah & Air Bersih Permukiman		1	1			1			1					
Pengelola Perumahan dan Permukiman	1		1				1				1			
Pengadministrasi Umum	1		1				1					1		
Kasi Pembinaan & Pengendalian Permukiman		1	1		1				1					
Pengawas Fisik Permukiman	1		1			1				1				
Pengadministrasi Umum	1			1								1		
Kabid Pertamanan dan Permakaman	1		1		1						1			
Kasi Pertamanan	1		1			1						1		
Analisis Taman		1	1			1				1				
Pengawas Lapangan / Petugas Operasional Lapangan	1		1				1					1		
Pengawas Lapangan / Petugas Operasional Lapangan	1		1				1							1

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas, terlihat bahwa tingkat pendidikan terbanyak ada pada tingkat pendidikan SLTA yaitu sebanyak 34 orang (42,50%) kemudian disusul dengan lulusan S-1 sebanyak 20 orang (25%), sementara lulusan S-2 sebanyak 6 orang (7,5 %). Dengan modal tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sebagai lembaga yang memosisikan dirinya menjadi operasionalisasi perencanaan perumahan dan permukiman menjadi lebih optimal.

E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Balikpapan, bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kota Balikpapan.

Peran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan sebagai dinas yang menyusun rancangan kebijakan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian teknis, dan pembinaan serta pengawasan di bidang perumahan dan permukiman, pertamanan dan permakaman di Kota Balikpapan.

Selanjutnya komitmen Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan untuk menghadirkan kinerja institusi yang inklusif, transparan dan akuntabel, diharapkan dapat menularkan karakteristik serupa dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Balikpapan, sejalan dengan visi dan misi Kota Balikpapan sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat dan Berkualitas, penyediaan Prasarana dan Sarana Perumahan yang Layak dan Merata, serta peningkatan Layanan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Balikpapan.

F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Permasalahan utama atau Isu-isu strategis OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategi adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya; dan apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh dari : Analisis internal, berupa identifikasi permasalahan pembangunan, maupun; Analisis eksternal, berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun mendatang. Dengan mencermati perubahan kondisi lingkungan serta isu yang berkembang maupun tuntutan terhadap lingkungan global, serta berdasarkan hasil telaah strategis terhadap faktor eksternal yang ditimbulkannya, maka Dinas Perumahan, Permukiman Kota Balikpapan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Luasan kawasan kumuh di kota Balikpapan

Masih luasnya kawasan permukiman kumuh di Kota Balikpapan yakni seluas 272 ha disebabkan karena pertumbuhan penduduk dikawasan perkotaan yang umumnya berasal dari migrasi tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota, sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah menempati sebuah rumah lebih dari satu KK dan masih terdapatnya rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni serta mahalannya harga lahan diperkotaan yang tidak diimbangi dengan kondisi ekonomi masyarakat menyebabkan masih luasnya permukiman kumuh di kota Balikpapan dan apabila hal tersebut tidak ditangani akan memperburuk wajah wilayah kota Balikpapan.

2. Tingginya backlog perumahan

Pemerintah tengah berjuang mengatasi masalah defisit atau *backlog* perumahan yang disebabkan tidak seimbangannya antara pasokan (suplai) dan permintaan (kebutuhan). Jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah lebih banyak dari pasokan rumah yang bisa disediakan tiap tahun, sehingga diperlukan sejumlah terobosan untuk mengatasi *backlog* perumahan.

3. Masih adanya rumah tidak layak huni

Berkaca dari masih luasnya kawasan kumuh di kota Balikpapan yang harus ditangani, hal ini salah satunya bisa disebabkan karena tingginya jumlah rumah tidak layak huni, yang secara tidak langsung menjadi salah satu pemicu suatu permukiman menjadi kumuh. Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Balikpapan diakibatkan karena jumlah populasi penduduk yang kian meningkat namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan untuk tempat tinggal. Tingginya jumlah RTLH juga diakibatkan karena ketimpangan yang cukup tinggi antara harga rumah dengan penghasilan yang diterima masyarakat. Hal ini tentu harus menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera menanggulangi permasalahan RTLH, karena rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat

4. Buruknya kondisi sanitasi pada wilayah padat penduduk

Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan tuntutan peningkatan standar kualitas hidup masyarakat, semakin tinggi tingkat pencemaran lingkungan dan keterbatasan daya dukung lingkungan itu sendiri menjadikan sanitasi menjadi salah satu aspek pembangunan yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam agenda pembangunan daerah.

G. SARANA DAN PRASARANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Sarana dan prasarana yang mendukung kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.
Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	Tanah	1.123	m ²
2	Bangunan	587,6	m ²
3	Ruang Rapat	2	Ruang
4	Sambungan Telepon	2	Jaringan
5	Jaringan Listrik	2	Jaringan
6	Jaringan Internet	1	Jaringan

7	Kursi Eselon II	1	Unit
8	Kursi Eselon III & IV	12	Unit
9	Kursi Staf	74	Unit
10	Kursi Rapat	42	Unit
11	Meja Kerja	51	Unit
12	Komputer P.C	27	Unit
13	AC	19	Unit
14	Taman Kantor	1	Areal
15	Lemari/Filling Besi	37	Unit
16	Lemari Kayu	25	Unit
17	Kendaraan Roda 2	43	Unit
18	Kendaraan Roda 4/Station Wagon	7	Unit
19	Truck	13	Unit
20	Pick Up	13	Unit
21	Motor Roda 3	1	Unit
22	Pick Up	13	Unit
23	Taman Kota	59	Areal
24	Rusunawa	9	Unit
25	Permakaman	32	Areal

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan mampu mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 yang memuat arah strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah disertai dengan rencana kerja dalam pendanaan yang bersifat indikatif, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan telah menyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2018 yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018. Dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan yang menjadi urusan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Memperhatikan Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan Periode Tahun 2016-2021, yaitu “Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman”, yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing Tinggi
2. Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan
3. Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Representatif
4. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan, terutama pada misi ke dua yaitu : “**Mewujudkan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan**”, menjadi acuan Dinas Perumahan dan Permukiman untuk membangun Kota Balikpapan, karena indikator misi kedua tersebut merupakan indikator kinerja utama yang terkait langsung dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dan harus disukseskan untuk dicapai. Dalam kaitan hal tersebut Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dengan menggunakan tugas pokok dan fungsi merumuskan Visi dan Misi yang ingin dicapai satu sampai lima tahun secara berkesinambungan.

1. VISI

Visi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah “**TERWUJUDNYA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI**”

2. MISI

Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ialah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman yang Sehat dan Berkualitas.
2. Menyediakan Prasarana dan Sarana Perumahan yang Layak dan Merata.
3. Meningkatkan Layanan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang difokuskan untuk mempertajam pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mendukung tujuan yang ditetapkan maka perlu penetapan sasaran guna mendukung perencanaan strategis. Sasaran adalah merupakan bagian integral dalam perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Permukiman dalam rangka mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan. Adapaun tujuan serta sasaran strategis dari Dinas Perumahan dan Permukiman disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.
Target Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman
Tahun 2017 - 2021**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2016	Target Kinerja Sasaran Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	%	2,45	2,41	2,37	2,32	2,28	2,23
Tersedianya rumah tinggal yang memenuhi persyaratan	Mengurangi Backlog Perumahan	Prosentase Penurunan Backlog Perumahan	%	89	83	81	79	77	75
	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	%	0,89	0,87	0,86	0,85	0,84	0,83
Meningkatkan keindahan dan layanan pemakaman	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	%	0,011	0,011	0,014	0,017	0,019	0,022
	Meningkatnya Pelayanan Pemakaman	Persentase Ahli Waris yang puas terhadap pelayanan pemakaman	%	90	92	94	95	96	98

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2018 memerlukan penjabaran dari sasaran strategis diatas harus dilakukan seiring dengan kebijakan anggaran dan komitmen seluruh pegawai, maka akan dijabarkan sebagai berikut :

Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategis dan kebijakan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan adalah sebagai berikut

1. STRATEGI :

1. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh
2. Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Kawasan Perumahan dan Permukiman
3. Mendorong Pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah
4. Fasilitasi Pembiayaan untuk perbaikan rumah tidak layak huni
5. Meningkatkan Jumlah Fasilitas dan Pelayanan Sanitasi
6. Pembangunan Taman kota baru
7. Perbaikan Layanan Permakaman

2. KEBIJAKAN

Kebijakan yang dirumuskan dengan strategi yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Penerapan Peraturan Daerah tentang Kawasan Permukiman untuk mencegah kawasan kumuh baru.
2. Pengentasan wilayah rawan sanitasi dan perluasan pelayanan sanitasi
3. Penerapan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau

Secara singkat Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.

**Rencana Kerja Tahunan
Dinas Perumahan dan Permukiman**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target (%)
1.	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	2,37
2.	Mengurangi Backlog Perumahan	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	81
3.	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	0,86
4.	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	0,014
5.	Meningkatnya Pelayanan Pemakaman	Persentase Ahli Waris yang puas terhadap pelayanan pemakaman	94

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas, maka direalisasikan melalui program dan dijabarkan dalam bentuk kegiatan. Program-program yang dikerjakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan pada tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan pada tahun 2018 melaksanakan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman melalui 8 program dan 38 kegiatan. Adapun program dan kegiatan dimaksud sebagai berikut :

**Tabel 5.
Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman**

No	Tujuan	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan
1	Terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh	Lingkungan Sehat Perumahan	Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh
2					Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
3					Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh II
4					Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh III
5					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Prasarana Berbasis Masyarakat
6					Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi

					Permukiman Kumuh
7					Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh (Hibah SAIIG Lanjutan)
8					Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh (Hibah APBN)
9					Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Permukiman Kumuh (DAK Penugasan TA.2018)
10	Tersedianya rumah tinggal yang memenuhi persyaratan	Mengurangi Backlog Perumahan	Prosentase Penurunan Backlog Perumahan	Pengembangan Perumahan	Pengembangan Data dan Informasi Bidang Perumahan
11					Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU)
12					Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan
13					Peningkatan Pemeliharaan Rumah Susun II
14				Pengelolaan Rumah Susun	Operasional Infrastruktur Rumah susun
15					Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun
16					Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (DAK Reguler TA.2018)
16	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman		
17	Meningkatkan keindahan dan layanan pemakaman	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota
18					Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh
19					Pembangunan Taman Kota
20		Meningkatnya Pelayanan Pemakaman	Persentase Ahli Waris yang puas terhadap pelayanan pemakaman	Pengelolaan Areal Pemakaman	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
21					Pembayaran Ganti Rugi Lahan Pemakaman
22	Pengadaan Lahan Untuk Pemakaman				
23				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat
24					Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
25					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
26					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
27					Penyediaan Alat Tulis Kantor
28					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
29					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

					Undangan
31					Penyediaan Makanan dan Minuman
32					Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah
33					Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
34				Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
35					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
36					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
37					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
38					Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan 5 (lima) indikator sasaran strategis yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, maka disusun 12 (dua belas) indikator kinerja program/kegiatan yang ditetapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan performa kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Wali Kota Balikpapan, yaitu sebagai tercantum dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 6.
Indikator Kinerja Program/Kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Penurunan luasan kawasan kumuh	Luas Kawasan Kumuh Kota Balikpapan sesuai SK Walikota tentang Kawasan Kumuh	Bidang Permukiman	Kabid Permukiman
2	Mengurangi Backlog Perumahan	Menurunnya backlog perumahan	Backlog Perumahan sesuai RP3KP 2014	Bidang Perumahan	Kabid Perumahan
3		Rumah susun yang terkelola dan terpelihara	Rumah Susun Terkelola/Jumlah Rumah Susun di Kota Balikpapan	UPT Rusunawa	Kepala UPT Rusunawa
4	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Rumah tidak layak huni	Hasil Identifikasi Rumah Tidak Layak Huni di Kota Balikpapan	Bidang Permukiman	Kabid Permukiman
5	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Taman yang terkelola dan terpelihara	Luas Taman yang Terpelihara/ Luas Taman Kota	Bidang Pertamanan &	Kabid Pertamanan dan

				Permakaman	Permakaman
6	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Areal Permakaman yang dikelola dan terpelihara	Luas Areal Makam yang Terpelihara/ Luas Areal Permakaman Kota	Bidang Pertamanan & Permakaman	
7		Persentase Kualitas Pelayanan administrasi perangkat daerah			Sekretaris
8		Presentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi			
9		Persentase Capaian Kinerja Tahunan Perangkat Daerah			
10		Meningkatnya disiplin pegawai			
11		Terpublikasinya dan Terpeliharanya dokumentasi kegiatan bidang perumahan dan permukiman			
12		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan penetapan kinerja ini, diharapkan mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat sebagai upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Dinas

Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2017-2021, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2018 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018. Perjanjian kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan target capaiannya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel.7
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	2,37%	Program Lingkungan sehat Perumahan
2	Mengurangi Backlog Perumahan	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	81%	- Program Pengembangan Perumahan - Program Pengelolaan Rumah Susun
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	0,86%	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	0,014%	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
5	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Persentase Ahli Waris yang merasa puas terhadap pelayanan	94%	Program Pengelolaan Areal Permakaman

1. Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.49.946.683.000,00. Melalui mekanisme perubahan APBD-P 2018 menjadi Rp.50.695.229.240,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.6.919.285.000,00 dan Belanja Langsung

Rp.43.775.944.240,00. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp.45.973.631.727,00 dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp.6.460.205.705,00 (93,37%) dan belanja langsung sebesar Rp.39.513.426.022,00 (91,83%).

2. Target Belanja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2018

Tabel.8
Target dan Realisasi Belanja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2018

No	Uraian	Tahun Anggaran 2018		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	6.919.285.000,00	6.460.205.705,00	93,37
2	Belanja Langsung	43.027.398.000,00	39.513.426,022,00	91,83
	Jumlah	49.946.683.000,00	45.973.631.727,00	92,05

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2018 Dinas Perumahan dan Permukiman yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel.9.
Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Prosentase (%)	Keterangan
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	14.770.500.000,00	37,42	Program Lingkungan sehat Perumahan
2	Mengurangi Backlog Perumahan	5.350.000.000,00	13,55	- Program Pengembangan Perumahan - Program Pengelolaan Rumah Susun
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	1.528.000.000,00	3,87	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	11.737.815.000,00	29,74	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
5	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	6.087.185.000,00	15,42	Program Pengelolaan Areal Permakaman

Disperkim

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan indikator pencapaian keberhasilan pembangunan dibidang perumahan dan permukiman dan merupakan evaluasi atas rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kinerja ini dikaji sebagai pengukuran kinerja. Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis didasarkan pada kelompok indikator kinerja penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai dasar untuk memberikan *reward or punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2017

A.a. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel.10.
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2016	Nilai 2017
1	2	3	4	5
1	Perencanaan Kinerja	30%	19,55	19,70
2	Pengukuran Kinerja	25%	9,69	10,00
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,58	10,25
4	Evaluasi Kinerja	10%	4,49	3,25
5	Capaian Kinerja	20%	15,28	17,00
Nilai Hasil Evaluasi		100%	61,59	60,20
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B (BAIK)	B (BAIK)

A.b. Tindak Lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP (Rekomendasi)

Menjawab hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Balikpapan bahwa berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun anggaran 2017 oleh Inspektorat Kota Balikpapan dengan hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja (LKj) sebesar 60,20 atau Kategori : B (Baik) telah ditindak lanjuti yaitu :

- Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (Indikator)
- Melakukan pengukuran terhadap kinerja secara berkala yaitu per triwulan
- Untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2018 telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja
- Mohon masukan dari tim Inspektorat terkait Indikator “Persentase Penyediaan Taman Kota” yang dianggap belum memenuhi kriteria SMART

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Tabel 11.
Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mengurangi luas kawasan kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	%	2,37	Triwulan I	-	-	
					Triwulan II	0,58	0,31	19,75
					Triwulan III	1,53	1,84	59,30
					Triwulan IV	2,37	2,37	100
2.	Mengurangi Backlog Perumahan	Persentase penurunan backlog perumahan	%	81	Triwulan I	83	82	101,25
					Triwulan II	83	80	103,62
					Triwulan III	82	75	108,53
					Triwulan IV	81	70	113,58
3.	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Presentase rumah tidak layak huni	%	0,86	Triwulan I	-	-	0
					Triwulan II	0,88	0,87	101,13
					Triwulan III	0,87	0,80	108,04
					Triwulan IV	0,86	0,77	110,46
4.	Meningkatnya penyediaan taman kota	Presentase penyediaan taman kota	%	0,014	Triwulan I	0,011	0,0005	4,54
					Triwulan II	0,012	0,0008	6,67
					Triwulan III	0,013	0,0011	8,46
					Triwulan IV	0,014	0,0013	9,17

5.	Meningkatnya pelayanan permakaman	Presentase ahli waris yang merasa puas terhadap pelayanan	%	94	Triwulan I	20	7,50	37,50
					Triwulan II	50	62,00	124
					Triwulan III	72	75,00	104
					Triwulan IV	94	100,00	106

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja mencakup target dan cara mencapainya melalui sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), program dan kegiatan. Kemudian dilakukan pengukuran kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja dan dituangkan dalam formulir pengukuran kinerja. Adapun uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis adalah uraian sebagai berikut :

Tabel.12
Formulasi Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi IKU
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Rencana Luas Kawasan Permukiman Pada RTRW}}$
2	Mengurangi Backlog Perumahan	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	$\frac{\text{Jumlah Backlog}}{\text{Jumlah Rumah}}$
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}}$
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	Persentase Penyediaan Taman Kota	$\frac{\text{Luas Taman}}{\text{Luas Kawasan Perkotaan}}$
5	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	Persentase Ahli Waris yang puas terhadap pelayanan Permakaman	$\frac{\text{Ahli Waris yang merasa puas}}{\text{Ahli waris yang mengajukan pelayanan}}$

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 5 (LIMA) indikator merupakan indikator kinerja sasaran (PK Eselon II) yang diperjanjikan antara Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan dengan Wali Kota Balikpapan. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran diperoleh melalui penghitungan

dengan formulasi tertentu, dan difokuskan pada indikator kinerja strategis. Penetapan cara pengukuran capaian kinerja meliputi semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Namun dalam perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :

a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Hasil pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikatnya sebagai berikut :

Capaian kinerja > 85 sd 100% : Sangat berhasil

Capaian kinerja >70 sd <85% : Berhasil

Capaian kinerja >55 sd <70% : Cukup berhasil

Capaian kinerja < 55 sd 0% : Tidak berhasil

Sehubungan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bagian dari Indikator Kinerja Sasaran, maka pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja sasaran. Sehingga dengan mengukur capaian indikator kinerja sasaran maka capaian indikator kinerja utama juga diperoleh capaiannya

Adapun pengukuran capaian kinerja dikelompokkan berdasarkan sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

Analisis Capaian Sasaran Strategis 1

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 1 : Mengurangi Luasan Kawasan Kumuh				
1	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh	2,37	2,37	100

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh sebesar 100% dengan predikat **berhasil** diperoleh dari :

$$\text{Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh} = \frac{\sum \text{Luas Kawasan Kumuh}}{\sum \text{Rencana Luasan Kawasan Permukiman pada RTRW}} \times 100\%$$

$$= \frac{272}{11.500} \times 100\%$$

$$= 2,37\%$$

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{2,37}{2,37} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Realisasi sebesar 2,37% memenuhi target kinerja pada tahun 2018 sebesar 2,37%. Pencapaian target kinerja dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan 2018)
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan 2018) dengan jumlah anggaran Rp. 7.894.000.000,00 meliputi pembangunan IPAL Komunal perpipaa sebanyak 50 Sambungan Rumah dan pembangunan septic tank individu pada 10 Kelurahan di Kota Balikpapan.
2. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh
Kegiatan Penangan Kawasan Permukiman Kumuh dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 meliputi kegiatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan drainase. Pembangunan jalan dan drainase tahun 2018 dilaksanakan pada kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat.
3. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh II

Kegiatan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dengan anggaran Rp.1.500.000.000,00 meliputi kegiatan fisik peningkatan jalan di lingkungan rumah nelayan di Kelurahan Baru Tengah dan Kelurahan Manggar.

4. Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh III

Kegiatan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh III dengan anggaran Rp.2.500.000.000,00 meliputi kegiatan pokok yaitu:

- a. Pembangunan Reservoir di Kelurahan Baru Tengah
- b. Pembangunan Sarana Taman di Kelurahan Baru Tengah
- c. Pembangunan Pergola di Kelurahan Baru Tengah

5. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Hibah SAIIG Lanjutan)

Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Hibah SAIIG Lanjutan) dengan jumlah anggaran Rp.240.200.000,00 meliputi DED Pembangunan Rumah Sanitasi dan Pembangunan Sarana Sanitasi Sambungan ke IPAL Komunal di Kelurahan Marga Sari.

6. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi

Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi dengan jumlah anggaran Rp.298.000.000,00 meliputi penyusunan DED dan kegiatan pemeliharaan sarana sanitasi di Kota Balikpapan.

7. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Hibah APBN)

Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Hibah APBN) dengan jumlah anggaran Rp.1.542.000.000,00 dengan kegiatan pokok yaitu pembangunan septic tank individu.

8. Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh

Kegiatan Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh dengan anggaran Rp.250.000.000,00 meliputi penyusunan DED penataan lingkungan kumuh.

Selain kegiatan diatas ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi keberhasilan penanganan kawasan kumuh di kota Balikpapan yaitu :

1. Dana dari berbagai sumber (APBN, APBD Prov dan APBD Kota)

Kebijakan Penanganan kawasan kumuh seluas 5 ha menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, selanjutnya diatas 10 dan 15 ha menjadi

tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Dana APBN yang dikucurkan melalui program KOTAKU disinyalir telah mampu mengurangi kawasan kumuh di Kota Balikpapan secara signifikan. Adapun kriteria kawasan kumuh adalah sebagai berikut :

- a. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis
- b. Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran
- c. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persy Teknis
- d. Tidak terpeliharanya Drainase
- e. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan
- f. Kualitas Konstruksi Drainase
- g. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan

Dengan dukungan dana dari berbagai sumber tersebut penanganan kawasan kumuh di Kota Balikpapan pada tahun 2018 telah melampaui dari 5 ha yang berarti telah melebihi dari target kinerja dengan sasaran berkurangnya luas kawasan kumuh.

Berdasarkan hasil perhitungan kumuh menggunakan baseline numeric program KOTAKU pada akhir tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Pengurangan Luas Kawasan Kumuh hasil penanganan tahun 2018 :

- Flag 1 : 156,68 ha
- Flag 2 : 9,6 ha
- Total : 166,28 ha

Sehingga Luas Kawasan Kumuh Akhir Tahun 2018 :

- Target Pemerintah Kota Balikpapan : 58,58 ha
- Target Kementerian : 52,35 ha (Flag 1)
6,23 ha (Flag 2)

2. Minat masyarakat dan didukung oleh aparat kelurahan pada kawasan rawan sanitasi untuk menerima program/kegiatan Lingkungan Sehat Perumahan berupa pembangunan IPAL Komunal dan septiktank individu..

Permasalahan yang dihadapi :

Permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Masih sering terjadi penolakan penolakan karena mindset masyarakat tentang IPAL/Pengolahan limbah adalah mengeluarkan bau sehingga beberapa lokasi pada awalnya menolak kegiatan ini, namun telah dilakukan upaya sosialisasi masyarakat tentang pentingnya memiliki

sepitank yang sehat disetiap rumah tangga agar limbah rumah terkelola dan tidak mencemari lingkungan. Sehingga akhirnya masyarakat dapat memahami dan kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

2. Karena sebagian besar kegiatan adalah pekerjaan yang bersifat swakelola sehingga masyarakat terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dan tidak semua profesional sehingga menyebabkan kegiatan tidak dapat selesai tepat waktu.
3. Menentukan dan mendapatkan lahan yang akan dihibahkan untuk pembuatan IPAL (5 x 10 m) cukup sulit sehingga perlu sosialisasi dan pendampingan yang kontinyu.
4. Pola hidup yang kurang sehat masyarakat di lingkungan kumuh, yang secara otomatis akan mempengaruhi penanganan kawasan kumuh dimaksud, sehingga perlu ketelibatan dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial maupun Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam rangka memberikan sosialisasi kepada Masyarakat.

Analisis Capaian Sasaran Strategis 2

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 2 : Mengurangi Backlog Perumahan				
1	Persentase penurunan backlog perumahan	81%	70%	113,58

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase penurunan backlog perumahan sebesar 113,58 % dengan predikat **berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Backlog} &= \frac{\sum \text{Backlog}}{\sum \text{Rumah}} \times 100\% \\
 &= \frac{85.100}{(118.355+ 2.826)} \times 100\% \\
 &= 0,70\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Pencapaian Kinerja} &= \frac{81 - (70-81)}{81} \times 100\% \\
 &= 113,58\%
 \end{aligned}$$

Indikator sasaran adalah penurunan backlog perumahan, sehingga target kinerja di tahun 2018 adalah menurunkan backlog perumahan dari 107.717 di tahun 2017 menjadi 90.078 berhasil terrealisasi pada akhir tahun 2018 bahkan lebih rendah lagi yakni mencapai 85.100. Hal ini menunjukkan bahwa backlog perumahan bias ditekan lebih rendah dari target kinerja pada tahun 2018.

Pencapaian target indikator dilaksanakan melalui program pengembangan perumahan dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan

Kegiatan Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan dengan anggaran Rp.100.000.000,00 meliputi biaya operasional pengawasan di lapangan dan biaya koordinasi dengan pihak pengembang.

2. Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sewa Sederhana (RUSUNAWA)

Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Rusunawa dengan anggaran Rp.110.700.000,00 meliputi kegiatan pokok pergantian atap void Rusunawa Manggar dan belanja pemeliharaan mesin serta pompa air.

3. Operasional Infrastruktur Rumah Susun

Kegiatan Operasional Infrastruktur Rumah Susun dengan anggaran Rp.1.389.300.000,00 meliputi honorarium petugas pengamanan dan operasional di Sembilan Rusunawa termasuk biaya operasional dan perbaikan rusunawa.

4. Pengembangan Data dan Informasi Bidang Perumahan

Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Bidang Perumahan dengan anggaran Rp.500.000.000,00 meliputi kegiatan pokok penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) Kota Balikpapan.

5. Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas

Kegiatan Verifikasi Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas dengan anggaran Rp.50.000.000,00 meliputi kegiatan koordinasi dengan pihak pengembang dan persiapan dokumen yang diperlukan dalam rangka penyerahan PSU.

6. Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun II

Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun II dengan anggaran Rp.2.500.000.000,00 meliputi kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Peningkatan Area Parkir Rusun Siaga
- b. Pembuatan Area Parkir Rusun Manggar

- c. Peningkatan Area Parkir Rusun Sepinggian
- d. Peningkatan Area Parkir Rusun Sumber
- e. Pembuatan atap Tandon Rusun Perusda I, Perusda II dan Rusun Sumber
- f. Pembuatan Atap Canopy, Jaring Pengaman pada Rusun Perusda I dan Rusun Perusda II
- g. Perbaikan Atap Rusun Beriman
- h. Perbaikan Atap Canopy dan Jaring Pengaman Rusun Sepinggian I
- i. Pembuatan Saluran Pembuangan Rusun Beriman
- j. Pembuatan Turap Rusun Siaga

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

1. Tersedianya Rumah Susun Sederhana dari Pemerintah Kota Balikpapan, terdapat Sembilan Rusunawa yang tersebar di Kota Balikpapan dengan daya tampung rata –rata 96 kamar per rusunawa
2. Pelaksanaan Program Satu Juta Rumah terdiri atas pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), rumah khusus, dan rumah swadaya dengan dana yang bersumber dari APBN dan APBD. Program Satu Juta Rumah dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kontribusi 20% dari target khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan pembangunan perumahan oleh pengembang swasta melalui skema subsidi untuk MBR sebanyak 30% dan skema nonsubsidi atau non-MBR sebanyak 50%.
3. Program rumah umum oleh pengembang yang difasilitasi atau disubsidi lewat APBN melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi selisih bunga, dan bantuan uang muka
4. Program rumah yang dibangun pengembang tanpa subsidi.

Permasalahan yang dihadapi

Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan terkait pada tahun 2018 yaitu kurang validnya data terkait jumlah perumahan secara keseluruhan di Kota Balikpapan yang disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang harus mengawasi di lapangan serta gagalnya penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) dalam kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Bidang Perumahan tahun anggaran 2018, hal ini disebabkan

oleh ketidakmampuan/*wanprestasi* pihak ketiga untuk menyelesaikan dokumen dimaksud.

Selanjutnya adalah antisipasi dalam mengatasi backlog kepemilikan rumah, karena diasumsikan bahwa jumlah *backlog* tiap tahun akan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah keluarga baru yang belum memiliki rumah, sementara faktor alam berupa lahan yang akan digunakan untuk perumahan semakin terbatas kedepannya.

Analisis Capaian Sasaran Strategis 3

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 3 : Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni				
1	Persentase penurunan rumah tidak layak huni	0,86%	0,77%	110,46%

Realisasi pencapaian indikator sasaran persentase penurunan rumah tidak layak huni sebesar 110,46 % dengan predikat **berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase penurunan} &= \frac{\Sigma \text{ Rumah Tidak Layak Huni}}{\Sigma \text{ Rumah}} \times 100\% \\
 \text{Rumah tidak layak huni} &= \frac{(1035-97)}{(118.355+ 2.826)} \times 100\% \\
 &= 0,77\% \\
 \% \text{ Pencapaian Kinerja} &= \frac{0,86 - (0,77 - 0,86)}{0,86} \times 100\% \\
 &= 110,46\%
 \end{aligned}$$

Indikator sasaran strategis 3 adalah penurunan persentase rumah tidak layak huni dari target 1035 pada tahun 2017 menjadi 1.030 pada tahun 2018, artinya terdapat target 5 unit rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni berhasil terealisasi lebih dari target kinerja pada tahun 2018 yakni 5 unit rumah menjadi 97 unit rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni di Kota Balikpapan.

Pencapaian target kinerja tersebut melalui kegiatan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (DAK Reguler TA.2018). Kegiatan Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni dengan anggaran Rp.1.528.000.000,00 meliputi kegiatan pokok yaitu peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di Kota Balikpapan sebanyak

97 unit. Kegiatan ini dilakukan untuk melaksanakan pembangunan peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berasal dari sumber dana DAK, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13.
Jumlah Rumah yang Menerima DAK Tahun 2018

No	Kelurahan	Jumlah Rumah
1	Manggar Baru	31
2	Margo Mulyo	66
Jumlah		97

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan :

1. Hasil verifikasi calon penerima bantuan, sehingga bantuan yang diberikan tidak salah sasaran. Proses verifikasi dilakukan dengan teliti, sehingga tidak ada calon penerima bantuan yang mengundurkan diri saat kegiatan sudah berjalan.
2. Kerjasama semua pihak dalam proses pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat berjalan dengan baik.

Permasalahan yang dihadapi :

Sejak tahun 2017 peningkatan rumah tidak layak huni hanya mengandalkan dana dari pusat, begitu pula pada tahun anggaran 2018 seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 14.
Jumlah Rumah Berdasarkan Sumber Dana Bantuan

No	Tahun	Sumber Dana	Jumlah Rumah
1	2017	APBN	200
2	2017	DAK	55
3	2018	DAK	97

Melihat data pada table diatas, dianggap perlu adanya dukungan juga dari dana APBD Kota Balikpapan agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlanjut secara kontinyu dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas khususnya masyarakat berpenghasilan rendah di kota Balikpapan.

Analisis Capaian Sasaran Strategis 4

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 4 : Meningkatnya Penyediaan Taman Kota				
1	Persentase Penyediaan Taman Kota	0,014%	0,0013,%	9,17%

Realisasi pencapaian indikator sasaran persentase penyediaan taman kota hanya mencapai 9,17% diperoleh dari :

$$\text{Persentase penyediaan taman kota} = \frac{\Sigma \text{Luas Taman Kota}}{\Sigma \text{Luas Kawasan Perkotaan (354,62 km}^2\text{)}} \times 100\%$$

$$= \frac{(38.701 + 600)}{354.620.000} \times 100\%$$

$$= 0,0013\%$$

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{0,0013}{0,014} \times 100\%$$

$$= 9,17\%$$

Tidak tercapainya target kinerja disebabkan karena berdasarkan Dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 bahwa indikator sasaran penyediaan taman kota ditarget seluas satu hektar artinya tiap tahun ditarget dapat menambah/membuat satu hektar taman, sementara berdasarkan hasil realisasi kegiatan pembuatan taman kota pada tahun 2018 hanya dianggarkan untuk pembuatan taman seluas ±600 m² yang terbagi dalam tiga kelurahan.

Berdasarkan data per Desember 2018, jumlah keseluruhan ruang terbuka hijau di Kota Balikpapan baik berupa taman aktif, taman pasif, dan bahu jalan adalah seluas 139.861,50 m² dengan perbandingan terhadap luasan wilayah perkotaan 354.620.000 m² adalah 19,72%. Jika melihat dari target renstra 2016-2021 bahwa luas taman pada tahun dasar perhitungan hanya seluas 38.701 m² sementara data terakhir di tahun 2018 adalah telah mencapai hampir 14 hektar, itu artinya jika dihitung dengan persentase penyediaan taman kota telah mencapai 0,039% melampaui target 0,014% di tahun 2018.

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pencapaian kinerja 9,17% tersebut hanya dilihat dari kemampuan untuk menyediakan/menambah luasan satu hektar per tahunnya tidak tercapai , namun secara global selama kurun waktu dari tahun dasar perhitungan renstra yakni tahun 2015 target untuk

penyediaan taman kota telah melampau target yang diharapkan yaitu dari 0,014% meningkat menjadi 0,039% dengan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \% \text{ Pencapaian Kinerja} &= \frac{0,039}{0,014} \times 100\% \\ &= 278,57\% \end{aligned}$$

Berikut di bawah ini dijelaskan secara rinci jumlah luasan taman di Kota Balikpapan pada tahun 2018

Tabel 15.
Luas Taman di Kota Balikpapan

No	Kecamatan	Luas (m ²)
1.	Balikpapan Kota	25.745
2.	Balikpapan Tengah	6.201
3.	Balikpapan Utara	53.875,50
4.	Balikpapan Selatan	53.640
5.	Balikpapan Timur	400
J U M L A H		139.861,50

Adapun kegiatan yang berkontribusi terhadap capaian target kinerja yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota
Kegiatan Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota dengan anggaran Rp.7.532.604.000,00 meliputi kegiatan pokok pemeliharaan dan pembelian pupuk, bahan kimia dan bahan penunjang lainnya untuk seluruh taman di Kota Balikpapan selama satu tahun.
2. Pembangunan Taman Kota
Kegiatan Pembangunan Taman Kota dengan anggaran Rp.600.000.000,00 meliputi pembuatan taman di kelurahan yaitu sebagai berikut:
 - a. Taman Kelurahan Batu Ampar
 - b. Taman Kelurahan Graha Indah
 - c. Taman Kelurahan Baru Tengah
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasaran Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh dengan anggaran Rp.3.480.211.000,00 meliputi belanja pegawai yang bertugas di posko pembibitan dan belanja untuk pendukung proses pembibitan tanaman hias/peneduh, serta pembuatan kolam penampungan air di km.12

Permasalahan yang dihadapi :

1. Ketersediaan lahan milik Pemerintah Kota untuk dibuat menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat terbatas.
2. Program satu Kelurahan satu taman tidak dapat berjalan karena tidak adanya lahan untuk taman dimaksud.

Untuk sementara baru terdapat 4 kelurahan yang mempunyai taman yaitu : Kelurahan Manggar, Kelurahan Marga Sari, Kelurahan Graha Indah dan Kelurahan Baru Tengah.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah mengajukan usulan anggaran ke Pemerintah Kota untuk pengadaan lahan pembangunan taman serta bekerjasama dengan pihak swasta untuk membangun taman secara swadaya di sekitar lingkungan mereka berada.

Analisis Capaian Sasaran Strategis 5

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran 5 : Meningkatnya Pelayanan Permakaman				
1	Persentase Ahli Waris yang puas terhadap pelayanan permakaman	94%	100%	106%

Realisasi pencapaian indikator sasaran Persentase ahli waris yang puas terhadap pelayanan permakaman 106 % dengan predikat **berhasil** diperoleh dari :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase ahli waris yang puas terhadap pelayanan permakaman} &= \frac{\sum \text{Ahli Waris yang merasa puas}}{\sum \text{Ahli Waris yang mengajukan pelayanan}} \times 100 \% \\
 &= \frac{1.798}{1.798} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Pencapaian Kinerja} &= \frac{94}{100} \times 100\% \\ &= 94\% \end{aligned}$$

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah kegiatan :

1. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Permakaman dengan anggaran Rp. 3.387.185.000,00 yang meliputi kegiatan pokok berupa Pengadaan sarana Prasarana Permakaman di TPU Km 15 dan TPU Telindung.
2. Pembayaran Ganti Rugi Lahan Permakaman
Kegiatan Pembayaran Ganti Rugi Lahan Permakaman dengan anggaran Rp.2.400.000.000 meliputi :
 - a. TPU Kristen Km2,5
 - b. TPU Gunung Satu Margo Mulyo
 - c. TPU Gunung Guntur
 - d. TPU Km 0,5
3. Pengadaan Lahan Untuk Permakaman
Kegiatan Pengadaan Lahan untuk Permakaman dengan anggaran Rp.500.000.000, namun kegiatan ini telah dirasionalisasi menjadi nol.

Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Struktur organisasi dan pembentukan personil pelaksana kegiatan
Pembentukan struktur organisasi dan personil pelaksana kegiatan dimaksud untuk mendistribusikan tugas dan tanggung jawab kepada personil pelaksana kegiatan. Struktur organisasi kegiatan yang dimaksud diatas terdiri dari :
 - Pengguna Anggaran
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 - Staff PelaksanaKeberhasilan kinerja yang dicapai sampai sejauh ini dipengaruhi SDM yang bekerja secara optimal baik dalam pengelolaan keuangan maupun dalam pelaksanaan kegiatan termasuk para petugas di permakaman yang tersebar di kota Balikpapan.
2. Koordinasi dan konsultasi
Kegiatan koordinasi memegang peranan penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan. Koordinasi dan konsultasi telah

dilaksanakan baik bersifat intern maupun dengan pihak-pihak luar yang berkepentingan (Dinas/Instansi terkait).

3. Secara Umum masyarakat yang mengajukan pelayanan permakaman tidak pernah mengajukan komplain atau kecewa atas pelayanan permakaman, sehingga bisa dijadikan acuan yang mendukung kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi :

Adapun permasalahan yang dihadapi terkait kegiatan diatas adalah terbatasnya lahan permakaman yang dapat disediakan pemerintah Kota. Untuk menanggulangi hal tersebut maka pada tahun 2018 telah disetujui kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Permakaman, namun dikarenakan dampak berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat ke daerah sehingga kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2018 ditiadakan alias dirasionalisasi.

D. REALISASI ANGGARAN

Adapun anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan ini realisasi tahun 2018 yang direalisasikan guna mewujudkan kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

1. Pagu tahun 2018 adalah sebesar Rp. 43.027.398.000,00 (Empat puluh tiga milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Belanja Langsung :

- Belanja pegawai Rp.13.642.325.000,00
- Belanja barang /jasa Rp. 19.589.573.000,00
- Belanja Modal Rp. 9.795.500.000.00

2. Realisasi anggaran pada per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.39.513.426.022,00 (Tiga puluh sembilan milyar lima ratus tiga belas juta empat ratus dua puluh enam ribu dua puluh dua rupiah) atau sebesar 91,83 % dari pagu anggaran, dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja pegawai Rp. 12.792.509.322,00
- Belanja barang /jasa Rp. 18.959.749.321,00
- Belanja Modal Rp. 7.761.167.379,00

Secara lengkap pagu dan realisasi program yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 16.
Realisasi Anggaran per Sasaran Startegis

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengurangi Luas Kawasan Kumuh	2,37	2,37	100,00	14.770.500.000,00	12.772.943.708,00	86,48
2	Mengurangi Backloig Perumahan	81	77	113,58	5.350.000.000,00	4.319.043.194,00	80,73
3	Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak Huni	0,86	0,70	110,46	1.528.000.000,00	1.396.305.500,00	91,00
4	Meningkatnya Penyediaan Taman Kota	0,014	0,0013	9,17	11.737.815.000,00	11.266.792.952,00	95,99
5	Meningkatnya Pelayanan Permakaman	94	100	106,00	6.087.185.000,00	5.852.306.620,00	96,14

Disperkim

Tabel 17.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2018

No	Program	Kegiatan	Anggaran			Keterangan
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7
	Sasaran 1 : Mengurangi Luas Kawasan Kumuh					
	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi (DAK Penugasan 2018)	7.894.000.000,00	7.889.605.000,00	99,94	
		Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	500.000.000,00	410.854.000,00	82,17	
		Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh II	1.500.000.000,00	0	0	Kegiatan tidak dilaksanakan
		Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh III	2.500.000.000,00	2.361.467.350,00	94,46	
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Hibah SAIIG Lanjutan)	240.200.000,00	226.087.000,00	94,12	
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi	298.000.000,00	278.971.000,00	93,61	
		Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Hibah APBN)	1.425.300.000,00	1.323.031.704,00	92,82	
		Perencanaan Penanganan Permukiman Kumuh	250.000.000,00	196.101.250,00	78,44	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sarana Prasarana Berbasis Masyarakat	163.000.000,00	86.826.404,00	53,27	
	Sasaran 2 : Mengurangi Backlog Perumahan					
	Program Pengembangan Perumahan	Pengembangan Data dan Informasi Bidang Perumahan	500.000.000,00	19.809.203,00	3,96	Putus Kontrak
		Pengawasan Penertiban Pengembangan Perumahan	100.000.000,00	80.924.030,00	80,92	
		Verifikasi Penyerahan Prsarana Sarana dan Utilitas (PSU)	50.000.000,00	13.856.000,00	27,71	
		Peningkatan Pemeliharaan Rumah Susun II	3.200.000.000,00	3.024.776.344,00	94,52	
	Program Pengelolaan Rumah Rumah Susun	Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Susun Sederhana (RUSUNAWA)	110.700.000,00	108.867.000,00	98,34	
		Operasional Infrastruktur Rumah Susun	1.389.300.000,00	1.070.810.617,00	77,08	
	Sasaran 3 : Mengurangi Persentase Rumah Tidak Layak huni					
	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (DAK Reguler TA 2018)	1.528.000.000,00	1.396.305.500,00	91,38	

Sasaran 4 : Meningkatnya Penyediaan Taman Kota					
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Peningkatan dan Pemeliharaan Taman Kota	7.532.604.000,00	7.194.630.660,00	95,51	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembibitan Tanaman Hias/Peneduh	3.605.211.000,00	3.479.016.737,00	96,50	
	Pembangunan Taman Kota	600.000.000,00	593.145.555,00	98,86	
Sasaran 5 : Meningkatnya Pelayanan Permakaman					
Program Pengelolaan Areal Permakaman	Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Permakaman	3.687.185.000,00	3.537.690.620,00	95,95	
	Pengadaan Lahan untuk Permakaman	500.000.000,00	0	0	Rasionalisasi
	Pembayaran Ganti Rugi Lahan Permakaman	2.400.000.000,00	2.314.616.000,00	96,44	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.500.000,00	1.596.000	29,02	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	116.032.746,00	58,02	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	30.000.000,00	28.570.000,00	95,23	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.000.000,00	97.570.500,00	97,57	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000,00	70.543.000,00	88,18	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	19.085.000,00	95,43	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	105.000.000,00	86.505.200,00	82,39	
	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah	500.000.000,00	493.717.780,00	98,74	
	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	316.614.240,00	305.809.400,00	96,59	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	47.770.000,00	10.400.000,00	20,93	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.330.000,00	13.168.000,00	85,90	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	100.000.000,00	93.648.000,00	93,47
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		180.000.000,00	164.914.700,00	91,62	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		2.452.230.000,00	2.278.002.322,00	92,90	
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		60.000.000,00	43.111.000,00	71,85	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		90.000.000,00	83.970.000,00	93,30	
J U M L A H		43.775.944.240,00	39.513.456.022,00	90,26	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan tahun 2018 adalah bentuk pertanggung jawaban Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan terhadap Perjanjian Kinerja 2018 yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran dan sekaligus merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan pada lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan.

LKjIP juga pada dasarnya merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Disperkim, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja.

Dalam pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2018 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala serta terdapat sasaran yang belum tercapai yang akan diupayakan perbaikannya.

Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2018 dan Renstra Tahun 2016-2021 sudah tercapai yakni dari 5 sasaran strategis, 4 diantaranya telah mencapai target kinerja. Sementara satu target kinerja dengan sasaran “Meningkatnya Penyediaan Taman Kota” tidak mencapai target yang diharapkan. Hasil analisis dalam kegagalan pencapaian target tersebut untuk indikator “*persentase penyediaan taman kota*” yang merupakan indikator sasaran dari misi ketiga yaitu “Meningkatkan Layanan Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah permasalahan lahan/keterbatasan lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota untuk dijadikan taman-taman kota sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar guna pembebasan lahan dimaksud.

Sehingga untuk menyiasati permasalahan tersebut maka perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pihak luar Disperkim baik dari pihak swasta, sekolah, maupun masyarakat secara umum guna membuat taman-taman secara swadaya agar penyediaan ruang terbuka hijau bukan hanya menjadi tugas pemerintah semata tetapi menjadi bagian dari tugas masyarakat kota Balikpapan guna sama sama mencapai visi “Terwujudnya Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni”.

Hasil yang telah dicapai di Tahun 2018 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Menyadari hal tersebut, langkah mengoptimalkan kinerja aparatur dan memobilisasi peran para pemangku kepentingan diperlukan agar keluaran program dan hasil kegiatan semakin bermanfaat dan tepat sasaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan untuk perbaikan pembuatan laporan ini dimasa mendatang.

Disperkim